

BAB II

CHINA DAN POLITIK LUAR NEGERINYA

Di abad ke-20 situasi politik internasional semakin kompleks. Pasca dunia dilanda krisis pada abad ke-19, berbagai negara di belahan bumi berkompetisi untuk kembali menjadi negara yang stabil. Setiap negara tidak hanya ingin mengkondisionalkan atau menstabilkan situasi dalam negeri saja. Namun setiap negara ingin menjadi sebuah bangsa yang memiliki *power*. Asia merupakan benua yang mengcover negara-negara dengan keberagaman etnis, agama dan budaya. China merupakan salah satu negara di Asia yang bangkit dari keterpurukan krisis dan memiliki politik luar negeri yang dinamis dan unik.

2.1 Tentang Negara China

China merupakan salah satu negara di Benua Asia yang memiliki cerita sejarah yang panjang. Di China terdapat banyak Dinasti yang mengisi sejarah berdirinya negara tersebut. Berdirinya China tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai dinasti. Pembentukan China dimulai pada 2100 SM oleh Dinasti Xia, dilanjutkan penyatuan China pada 221 SM oleh Dinasti Qin. Dalam perkembangan sejarah China menjadi negara Republik yang didirikan pada 1 Januari 1912, kemudian pada 1 Oktober 1949 China memproklamasikan negaranya menjadi Republik Rakyat China.

Negara China berada di Asia bagian Timur yang bertetangga dengan Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. China menempati

posisi nomor 2 peringkat negara yang terluas di Asia dibawah Rusia. Di wilayah utara China berbatasan langsung dengan Mongolia, wilayah bagian barat berbatasan langsung dengan Kirgiztan dan Tajikistan, wilayah bagian selatan berbatasan langsung dengan Nepal, Bhutan dan Myanmar, wilayah bagian timur berbatasan langsung dengan Taiwan dan Laut China Timur. Secara geografis luas wilayah China adalah 9.596.961 km² .¹ China merupakan daratan yang sangat luas di Asia Timur, di dataran selatan lebih didominasi oleh pegunungan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah China



China memiliki populasi penduduk yang terpadat di dunia dengan peringkat pertama di atas India dan Amerika. Menurut World Bank dan Biro Sensus Amerika, jumlah penduduk China pada tahun 2013 adalah 1,357 Miliar. Angka kepadatan

¹ Info Please. *China*. <https://www.infoplease.com/atlas/china>. Retrieved November 22, 2016.

penduduk tersebut meningkat enam miliar selama setahun dari tahun 2012. Dengan kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, pemerintah China mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana secara intensif. Hal tersebut menjadi harapan China agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu signifikan.

Warga negara China lebih dominan menggunakan bahasa mandarin, kemudian ada beberapa warga yang menggunakan bahasa Korea, Mongolia dan Vigur. Namun secara resmi, bahasa yang digunakan China adalah bahasa Mandarin. China memiliki keberagaman agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Agama yang ada di China meliputi, Islam, Katolik, Budha Mahayana, dan Protestan. Selain itu, juga terdapat beberapa kepercayaan yang dipercaya masyarakat China yakni Kong Hu Chu dan Tao. Kemudian di China terdapat beragam budaya dan tempat-tempat sejarah yang menjadi nilai tersendiri bagi kemajuan China.

Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara sosialis dengan masyarakat yang demokratis. Pada dasarnya China menganut sistem sosialis dimana semua kekuasaan ditangan Rakyat China. Bentuk negara China adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan komunis. Pembagian wilayah administratif China meliputi Provinsi, Daerah Otonomi, dan Kota Madya. China juga dikatakan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan yang sosialis dan otokratis.

Di China terdapat partai yang memiliki peran yang intensif dalam perpolitikan yakni Partai Komunis. Partai Komunis merupakan partai yang didirikan oleh Mao Zedong pada tahun 1921. Partai ini memiliki jumlah anggota yang sangat besar di

seluruh dunia yakni lebih dari 63 juta, bahkan partai komunis menempati kualifikasi partai terbesar di dunia. Di sisi lain, juga terdapat partai politik selain Partai Komunis, namun partai tersebut hanya sekedar sup-partai.

Pemerintahan China didampingi oleh Partai Komunis dalam menjalankan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, Partai Komunis memiliki peran dalam menentukan sebuah kebijakan. Kemudian dalam pemilihan kepemimpinan, pemimpin negara dan Partai Komunis dipilih langsung oleh partai melalui kongres. China sebagai penganut komunisme menjadikan dasar ideologi ini sebagai panduan ajaran, pandangan dan filsafat untuk mencapai tujuan dan norma baik dalam politik maupun sosial. Dengan mengamalkan komunisme, China mampu membentuk tatanan politik yang penuh dalam menentukan sebuah kebijakan. Sehingga pemerintah China bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan nasionalnya.

2.2 Dinamika Politik Luar Negeri China

Politik luar negeri China memiliki karakteristik yang dinamis. Sebagai negara besar, China sedang meningkatkan pengaruhnya di kancah internasional terutama di kawasan Asia Pasifik. Politik luar negeri China sangat berpengaruh terhadap kemakmuran kondisi nasionalnya. Sehingga efektif atau tidaknya suatu kebijakan luar negeri yang diformulasikan kepada negara lain atau kancah internasional sangat krusial bagi kemajuan nasional China.

Kebijakan luar negeri China masih mempertahankan panduan terhadap warisan tradisional ala komunis dimana melanjutkan kepemimpinan sejak awal seperti

Mao Zhedong sampai saat ini Xi Jinping. Sebagai negara komunis proses pembuatan kebijakan luar negeri China terpusat pada komando yang sentral. Artinya, kebijakan luar negeri China sangat ditentukan oleh pemimpin dan orang di sekitarnya. Selain itu, dalam pembuatan keputusan luar negeri diputuskan melalui grup *Think Tank* atau Politburo dalam pemerintahan China.

Politburo merupakan lembaga eksekutif partai komunis yang mengurus dan memutuskan suatu masalah. Pemerintahan China dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri telah dikendalikan oleh politburo. Kebijakan yang diambil juga dipengaruhi oleh partai komunis China (PKC). Setiap sebulan PKC melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh China dan tidak dipublikasikan. Politburo juga masih dipimpin oleh *Politburo Standing Comitee* dimana ini merupakan lembaga pembuatan keputusan terakhir China.

China memiliki tokoh negarawan yang berkiprah dalam merintis kebangkitan China dengan beragam bentuk politik luar negerinya. Tokoh tersebut meliputi Mao Zedong dengan ideologi politik Maoisme, Deng Xiaoping dengan ideologi Teori Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hujintao dengan konsep pengembangan ilmiah dan Xi Jinping (2013-2015) melanjutkan pendahulunya.

Maoisme sebagai ideologi mantan pemimpin China Mao Zedong merupakan varian dari Marxisme. Ideologi Maoisme ini diaplikasikan dalam perpolitikan pada masa pemerintahannya baik dalam politik ataupun militer. Politik luar negeri China

pada masa Mao dominan dipengaruhi oleh ideologi komunisme dan lebih bersikap tertutup dalam konteks ekonomi terhadap dunia internasional.

Pada 1949-1953, kebijakan China telah beraliansi dengan komunisme internasional, karena kebijakan ini ditujukan untuk mendukung konsolidasi kekuatan, penyatuan wilayah dan antisipasi terhadap ancaman luar. Pada kebijakan ini politik luar negeri China dipengaruhi oleh faktor internal dan hubungan dengan negara-negara besar yakni AS dan Uni Soviet. Pada 1954-1959 China menerapkan kebijakan hidup berdampingan secara damai. Kebijakan ini diambil karena dalam pembangunan lima tahun pertama oleh Mao Zedong ingin menghapus persepsi dunia luar terhadap China yang dianggap Agresif. Persepsi ini diklaim karena waktu itu China telah terlibat dalam perang Korea, serangan Tibet dan pembebasan Taiwan. Tahun 1960-1965, kebijakan politik luar negeri China adalah Anti-revisionisme dan Anti-imprialisme. Hubungan China-Soviet telah pecah di periode ini, kemudian Soviet menghentikan bantuan ekonomi dan menarik ahli-ahlinya. Akibat dari kebijakan Soviet tersebut pembangunan ekonomi dan proyek-proyek China terbengkelai, sehingga China merasa terkhanati atas kebijakan tersebut.

Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping dengan teorinya berfokus pada penekanan konstruksi, ekonomi dan stabilitas dalam berbagai sektor. Ideologi tersebut juga telah mendorong terjadinya reformasi perekonomian China. Pada tahun 1978 Deng Xiaoping juga membuat kebijakan China sebagai *one country two sistem* (satu negara dengan dua sistem pemerintahan), kebijakan tersebut ditujukan agar tercapainya persatuan dan reunifikasi China. Pada masa Hujintao China menerapkan

kebijakan Sosioekonomik yang menggabungkan kesejahteraan sosial, ketahanan dengan pengembangan, masyarakat yang terfokus pada orang, kemudian peningkatan demokrasi dan menciptakan masyarakat yang harmoni.

Pasca Perang Dingin (*cold war*), kebangkitan China menjadi pusat perhatian dan fenomena politik yang menarik dalam studi hubungan internasional. Pasalnya dengan runtuhnya Uni Soviet dengan ideologi komunis yang berbengaruh di belahan Eropa Timur telah menjadi getaran transformasi di seluruh belahan dunia. Banyak negara yang menerapkan sistem multipartai dan sistem demokrasi, namun China tetap teguh dan kokoh dengan ideologi komunis. Prinsip China dalam mempertahankan komunis telah menjadikan kekuatan yang besar bagi negaranya. Dengan menerapkan sistem komunis, pada dasarnya berdirinya China mengadopsi sistem pemerintahan yang tertutup terhadap dunia luar. Jadi, segala kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya dikontrol oleh Komunisme.

Dalam tradisi komunis China memiliki sistem yang sentralis selama tiga dekade pertama. Era pertama, tahun 1949-1956 merupakan masa rekonstruksi dan reformasi. Era kedua atau disebut *One Man Management* (menejemen tunggal), tahun 1956-1959 China telah mengimpor teknologi dan pemikiran ala soviet, namun tidak bisa mengimprovisasi negaranya. Kemudian dilanjutkan era ketiga dengan *Great leap Forward* (lompatan jauh kedepan), tahun 1959-1960 dengan sebuah reformasi Budaya.

Deng Xiaoping juga seorang dari Partai Komunis namun Ia dari fraksi reformis. Kebijakan Deng telah mereformasi sistem ekonomi China menjadi lebih

bebas atau dengan pola sistem liberal. Kebijakan tersebut juga telah mendorong perubahan sistem ekonomi yang tertutup menjadi terbuka. Dengan menerapkan reformasi ekonomi, Deng berhasil membawa kemajuan China menjadi negara yang semakin maju dan kuat. Oleh karena itu, selama era reformis China telah mengalami banyak gejolak perubahan. Kehidupan sosial semakin meningkat, ekonomi maju, sehingga masyarakat miskin China semakin berkurang.

Xi Jinping dalam melaksanakan kebijakan luar negeri China telah meningkatkan budaya damai melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Kebijakan tersebut menganut dan meneruskan budaya tradisional yang turun temurun dari para pemimpin China sebelumnya.

China sejak awal terus berupaya untuk meningkatkan kemajuan negaranya. Dengan sebuah reformasi besar-besaran di China telah menjadi sebuah predikat tersendiri di kancah internasional. China mampu berkompetisi dengan optimal, walaupun terjadi penolakan mengenai sejarah kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin di setiap eranya. Namun pada dasarnya China optimis dan berupaya keras untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional.

Politik Luar Negeri China menerapkan kebijakan damai yang independen. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan mempertahankan kedaulatan. Dalam meningkatkan perannya di lingkungan internasional China telah mendorong sebuah modernisasi, keterbukaan dan perubahan. Dengan demikian China juga mendukung terciptanya dunia yang aman dan damai. Mengenai pembangunan, tata ekonomi dan politik dunia yang baru, Cina berharap dunia internasional bisa

damai dalam jangka waktu panjang yang dapat mensupport pembangunan semua negara di dunia.² Dengan demikian China menerapkan lima prinsip untuk kelangsungan hidup negaranya yakni menghormati kedaulatan dan integritas territorial (wilayah); tidak mencampuri urusan dalam negeri; tidak saling menyerang; kesetaraan dan keuntungan bersama; dan hidup damai secara berdampingan.

Dalam kebijakan luar negeri atas menjaga perdamaian di dunia, China berperan aktif dalam upaya perdamaian Korea Utara dan Selatan. China tidak lagi memposisikan faktor ideologi dalam kebijakan luar negerinya. Tujuan utama China dalam politik luar negerinya lebih mengutamakan kepentingan dan kemajuan bersama dengan sebuah kerjasama. Dengan kerjasama China berharap dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap berbagai negara yang bekerjasama denganya. Kemudian keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut dapat dinikmati bersama. Oleh karena itu, China lebih mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara baik negara berkembang maupun maju untuk mendorong kebijakannya sebagai kemandirian dan keterbukaan di dunia internasional.

Kemandirian bagi China merupakan hal penting yang menjadi dasar kiprahnya di kancah Global. Kebijakan dan posisi politik luar negeri China bergantung dengan konteks yang ada. Hal tersebut telah menjadikan China tetap tegas dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan, wilayah dan masalah di dalam negerinya. Ketegasan tersebut menjadi sebuah karakteristik China dalam politik luar

² Mughtar, A. T. (2011). *Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Presepsi dan Pilihan*. Jurnal MAARIF, Hal 32.

negerinya. Seperti konsistensi China dalam isu Taiwan yang merupakan masalah dalam negeri serta isu Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun.

Oleh karena itu China menjadi hal yang menarik dalam studi hubungan internasional mulai dari keadaan geografis, populasi wilayah, budaya, dan sejarah. Bahkan proses kebangkitan China sebagai negara kekuatan baru menjadi sesuatu yang kompleks dalam pemerintahan China. Kemudian dengan karakteristik yang dinamis dalam politik luar negerinya, China menjadi negara yang sulit ditebak peran dan perilakunya di kancah internasional.